



Analisis *Best Practice* Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi

Rizan Hasbullah^{1*}, Wahib Assyahri², Diga Putri Oktaviane³, Yulia Ningsih⁴

¹⁻⁴ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Rizanhasbullah09@gmail.com

Abstract. *Family resilience in Indonesia faces multidimensional pressures reflected in increasing divorce rates, violence against children, and youth involvement in drug abuse and promiscuity. Bukittinggi City, despite having strong cultural traditions based on local wisdom and religious values, has also experienced an increase in divorce cases and domestic violence. In response, the Bukittinggi City Government launched the Family School Program aimed at strengthening the eight functions of the family: religious, cultural, affection, protection, reproductive, educational, economic, and environmental. This study aims to analyze the best practices of this program using five UN-Habitat indicators: impact, partnership, sustainability, leadership, and transferability. The research method used is qualitative exploratory with data collection through in-depth interviews with informants consisting of alumni, active participants, program managers, and sub-district coordinators, as well as participatory observation and documentation. The results show that the program successfully improved emotional control, family communication, and child-rearing patterns significantly. Multi-stakeholder partnerships with technical agencies, religious institutions, and academics are strong, but the private sector has not yet been involved. Program sustainability is supported by the Mayor's Decree and alumni enthusiasm, but funding remains vulnerable as it is entirely dependent on the local budget. Leadership is distributive from the political level to the community level, but is female-dominated with very low male participation. The program has high replication potential and has attracted many regions for comparative studies. In conclusion, this program falls into the category of good practice approaching best practice, but requires strengthening economic impact, diversifying funding, and increasing male participation.*

Keywords: *Best practice; Family Development; family resilience; Family School; Social Welfare.*

Abstrak. Ketahanan keluarga di Indonesia menghadapi tekanan multidimensi yang tercermin dari peningkatan angka perceraian, kekerasan pada anak, serta keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Kota Bukittinggi, meskipun memiliki tradisi kultural yang kuat berbasis falsafah adat dan agama, juga mengalami peningkatan kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai respons, Pemerintah Kota Bukittinggi meluncurkan Program Sekolah Keluarga yang bertujuan memperkuat delapan fungsi keluarga: keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik terbaik program tersebut menggunakan lima indikator UN-Habitat, yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari alumni, peserta aktif, pengelola program, dan koordinator kelurahan, serta observasi partisipatif dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan kontrol emosi, komunikasi keluarga, dan pola asuh anak secara signifikan. Kemitraan multi-stakeholder dengan dinas teknis, institusi agama, dan akademisi berjalan kuat, namun sektor swasta belum terlibat. Keberlanjutan program didukung oleh Surat Keputusan Wali Kota dan antusiasme alumni, tetapi pendanaan masih rentan karena sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah. Kepemimpinan bersifat distributif dari level politik hingga komunitas, namun didominasi perempuan dengan partisipasi laki-laki yang sangat rendah. Program ini memiliki potensi replikasi tinggi dan telah menarik banyak daerah untuk studi banding. Kesimpulannya, program ini termasuk kategori praktik baik yang mendekati praktik terbaik, namun perlu penguatan dampak ekonomi, diversifikasi pendanaan, dan peningkatan partisipasi laki-laki.

Kata Kunci: *Best practice; Sekolah Keluarga; ketahanan keluarga; Kesejahteraan Sosial; Pengembangan Keluarga.*

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam struktur sosial masyarakat. Ketahanan keluarga tidak hanya menentukan kualitas hidup individu, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terbangunnya modal sosial yang kuat untuk pembangunan bangsa. Dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, ketahanan keluarga diposisikan

sebagai salah satu pilar strategis untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan berkualitas. Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa institusi keluarga tengah menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Berbagai survei dan data lintas sektor mengindikasikan adanya krisis multidimensi yang berakar dari melemahnya fungsi keluarga. Data Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan angka perceraian, sementara data kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya literasi pengasuhan di kalangan orang tua, minimnya keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang anak, serta tekanan ekonomi yang menggeser prioritas keluarga dari fungsi edukatif ke fungsi ekonomis semata. Penelitian intervensi terkini di Indonesia menunjukkan bahwa stimulasi dini dan pengasuhan responsif sangat penting untuk mendorong perkembangan kognitif dan sosio-emosional anak (Development, n.d.). Sebaliknya, ketiadaan pola asuh yang responsif dan konsisten dapat memicu berbagai masalah perilaku yang berlanjut hingga masa remaja dan dewasa. Dengan demikian, intervensi yang tepat sasaran pada level keluarga, khususnya pendidikan orang tua, menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan di Sumatera Barat memiliki karakteristik sosial yang unik. Sebagai daerah dengan tradisi kultural yang kuat berbasis falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, masyarakatnya secara normatif memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai agama dan adat dalam membina keluarga. Potensi ini seharusnya menjadi modal sosial yang kuat untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang optimal bagi generasi muda. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dengan praktik pengasuhan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia & Suryana (2021) di Kota Bukittinggi mengungkap bahwa masih banyak orang tua yang belum menerapkan pengasuhan yang baik terhadap anaknya. Faktor penyebab utamanya adalah terbatasnya pengetahuan orang tua tentang metode pengasuhan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, serta adanya berbagai masalah internal keluarga seperti konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu (Rahmalia & Suryana, 2021).

Fenomena ini semakin diperparah dengan masuknya teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pendampingan orang tua yang memadai. Anak-anak memiliki akses bebas terhadap gawai dan konten digital tanpa filter yang memadai dari orang tua, yang berdampak pada terganggunya interaksi sosial antar teman sebaya dan melemahnya kontrol keluarga

terhadap perkembangan karakter anak. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan pengasuhan bukan lagi sekadar masalah teknis metodologis, tetapi telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan intervensi sistemik dari pemerintah daerah maupun lintas sektor terkait. Selain itu, ada indikasi peningkatan permasalahan sosial yang berakar dari kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Sasmita (2022) mencatat peningkatan jumlah perceraian di Kota Bukittinggi dari 576 menjadi 672 kasus serta peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak dari 48 menjadi 55 kasus. Merespons kondisi darurat ketahanan keluarga tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) meluncurkan Program Sekolah Keluarga yang telah berjalan sejak tahun 2019 (Sasmita, 2022). Program ini dirancang sebagai wadah pendidikan non-formal bagi orang tua untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengasuh dan mendidik anak. Hingga tahun 2025, program ini telah meluluskan sebanyak 2.267 peserta, atau sekitar 5,3 persen dari total 42.733 kepala keluarga di Kota Bukittinggi (Sasmita, 2022). Penelitian ini menjadi penting karena belum pernah dilakukan evaluasi terhadap program ini menggunakan kerangka best practice yang terstandar secara internasional, seperti indikator dari UN-Habitat (UN-Habitat, 2014).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Best Practice*

Menurut UN-Habitat *best practice* atau praktik terbaik yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah inisiatif yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap peningkatan kualitas hidup di kota dan komunitas di seluruh dunia (UN-Habitat, 2014). Definisi operasionalnya mencakup tiga kriteria evaluasi utama yaitu kemitraan antara dua atau lebih lembaga publik, otoritas lokal, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, profesional, dan akademisi; dampak berupa perbaikan nyata terhadap lingkungan kehidupan masyarakat; dan keberlanjutan yang dibuktikan dengan perubahan berkelanjutan dalam legislasi, kapasitas kelembagaan, sistem manajemen, serta alokasi sumber daya dan keuangan (Clarke & Garside, 1997). Inisiatif *Best Practices* UN-Habitat dimulai sebagai pencarian global atas kisah sukses permukiman manusia yang menjadi bagian resmi dari proses persiapan Konferensi Habitat II di Istanbul pada Juni 1996. Pada batas waktu resmi, inisiatif ini menghasilkan lebih dari 600 kiriman dari 80 negara. Program *Best Practices and Local Leadership* (BLP) didirikan pada tahun 1997 sebagai respons terhadap panggilan Habitat Agenda untuk memanfaatkan informasi dan jejaring dalam mendukung implementasinya (UN-Habitat, 2014).

BLP adalah jaringan global dari lembaga pemerintah, otoritas lokal, asosiasi mereka, institusi profesional dan akademik, serta organisasi akar rumput yang didedikasikan untuk identifikasi dan pertukaran praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan. Selain tiga kriteria utama tersebut, UN-Habitat juga mencakup aspek tambahan seperti kepemimpinan dalam menginspirasi tindakan dan perubahan; promosi akuntabilitas dan transparansi; pemberdayaan masyarakat; responsivitas terhadap keragaman sosial dan budaya; potensi transfer ke daerah lain; kesesuaian dengan kondisi lokal; kesetaraan gender; serta inklusi sosial (UN-Habitat, 2014). Berdasarkan kerangka evaluasi UN-Habitat (Hartomi et al., n.d.), penilaian terhadap suatu best practice menggunakan lima indikator utama:

Dampak (*Impact*)

Dampak mengacu pada perubahan positif dan negatif, primer dan sekunder jangka panjang yang dihasilkan oleh intervensi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konteks best practice, indikator ini mengukur sejauh mana program atau kebijakan telah menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi masyarakat sasaran. Dampak dapat berupa peningkatan kualitas hidup, perubahan perilaku, perbaikan indikator pembangunan tertentu, atau kontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan merujuk pada kualitas dan kedalaman kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. UN-Habitat secara konsisten menekankan pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam semua programnya. Klien utama program Best Practices UN-Habitat mencakup para pengambil keputusan, profesional praktisi di semua tingkat pemerintahan dan sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, serta masyarakat umum.

Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan didefinisikan sebagai kemungkinan berkelanjutan atau bertahannya manfaat suatu intervensi setelah intervensi tersebut berakhir. Dalam best practice UN-Habitat, keberlanjutan dibuktikan dengan perubahan berkelanjutan dalam legislasi, kapasitas kelembagaan, sistem manajemen, serta alokasi sumber daya dan keuangan.

Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan mengacu pada peran aktor kunci dalam menginisiasi, menggerakkan, dan mempertahankan program. Dalam filosofi UN-Habitat, kepemimpinan yang efektif dalam *best practice* tidak bersifat *top-down* semata, tetapi harus didistribusikan ke berbagai level (*locally-led and responsive policies and governance*).

Transfer ke daerah lain (*Transferability*).

Transferability atau kemampuan untuk direplikasi adalah potensi suatu praktik baik untuk diadopsi di konteks geografis dan sosial yang berbeda. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari Best Practices Programme UN-Habitat, yaitu memfasilitasi transfer pengetahuan, pengalaman, dan keahlian melalui cara-cara kerja sama baru, termasuk kerja sama south-south. UN-Habitat membedakan antara outcomes (hasil jangka menengah) dan impact (dampak jangka panjang). Keberlanjutan didefinisikan sebagai kemungkinan berkelanjutan atau bertahannya manfaat suatu intervensi setelah intervensi tersebut berakhir (UN-Habitat, 2018). Transferability adalah potensi suatu praktik baik untuk diadopsi di konteks geografis dan sosial yang berbeda, yang merupakan salah satu tujuan utama dari Best Practices Programme UN-Habitat. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik terbentuk melalui sebuah siklus yang utuh mencakup serangkaian tahapan berkelanjutan, yang dimulai dari perumusan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi berbagai alternatif solusi, kemudian implementasi kebijakan, dan pada akhirnya kembali lagi ke tahap perumusan masalah untuk evaluasi atau penyempurnaan. Menurut Anderson, kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok aktor untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Winarno, 2014). Sementara Easton mendefinisikan kebijakan sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif kepada seluruh anggota masyarakat, menekankan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan sah untuk bertindak terhadap masyarakat (Tahir, 2011).

Implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi setelah suatu undang-undang ditetapkan, di mana undang-undang tersebut memberikan otoritas terhadap suatu program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang bersifat nyata (Winarno, 2014). Implementasi juga mencakup tindakan (maupun kelambanan tindakan) dari berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang bertujuan untuk menjalankan suatu program. Menurut Grindle, implementasi secara umum dipandang sebagai tugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan realisasi tujuan-tujuan kebijakan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah (Suwitri, 2014). Model implementasi kebijakan

yang dikembangkan oleh George C. Edwards III menamakan model implementasi kebijakan publik dengan pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Igirisa, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2018). Kemudian Creswell (2009) menambahkan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses inkuiri yang didasarkan pada tradisi metodologis tertentu untuk mengeksplorasi masalah sosial atau masalah manusia. Penelitian eksploratif kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, memperdalam, dan menemukan pemahaman baru tentang suatu fenomena yang masih belum banyak diketahui atau belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Februari 2026 sampai dengan Mei 2026.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Moleong, 2018). Data sekunder diperoleh dari modul Sekolah Keluarga Gemilang, laporan kegiatan program tahun 2018-2025, dan data statistik peserta dari DP3APPKB Kota Bukittinggi (Sugiyono, 2013). Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan *snowball sampling* untuk menemukan informan-informan kunci yang mungkin tidak teridentifikasi di awal (Creswell, 2009). Total informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, terdiri dari alumni program, peserta aktif, pengelola program di DP3APPKB, dan koordinator Sekolah Keluarga di tingkat kelurahan. Teknik analisis data menggunakan model dari Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan interaktif: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Abdussamad, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Sekolah Keluarga

Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi pertama kali dicetuskan pada tahun 2018 oleh Yesi Endriani Ramlan Nurmatias, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bukittinggi (Sasmita, 2022). Gagasan ini berawal dari keprihatinan atas berbagai persoalan sosial yang bersumber

dari kehidupan keluarga, di mana keluarga yang sehat dinilai mampu membentuk individu yang berperan positif di masyarakat.

Program ini kemudian diadopsi sebagai salah satu Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Ibnu Asis, serta terus berlanjut hingga masa kepemimpinan berikutnya. Pada tahun 2025, program ini bertransformasi dan diluncurkan dengan nama "Sekolah Keluarga Gemilang" yang disertai dengan penyusunan modul resmi sebagai pedoman pelaksanaan. Program Sekolah Keluarga di Bukittinggi dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi sebagai leading sector. Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah kota dan dokumen program, Sekolah Keluarga Bukittinggi memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Mewujudkan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah. Wali Kota Bukittinggi menyatakan bahwa jika ketahanan keluarga terwujud, maka hubungan masyarakat akan lebih harmonis.
- b. Membekali orang tua dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, berkarakter, dan tangguh.
- c. Mencegah masalah sosial seperti perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kriminalitas, stunting, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas. Mendukung pencapaian visi Kota Bukittinggi yaitu "Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya" serta mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045

Analisis Best Practice Program Sekolah Keluarga Kota Bukittinggi

Keberhasilan suatu program publik tidak hanya diukur dari output atau outcome jangka pendek, tetapi juga dari kemampuannya untuk memenuhi standar praktik terbaik yang diakui secara internasional. Dalam penelitian ini, kerangka analisis yang digunakan mengacu pada lima indikator penilaian best practice yang dikembangkan oleh UN-Habitat (2014), yaitu dampak (*impact*), kemitraan (*partnership*), keberlanjutan (*sustainability*), kepemimpinan (*leadership*), dan transfer ke daerah lain (*transferability*). Kelima indikator ini dipilih karena komprehensif dalam menilai program sosial sekaligus relevan dengan karakteristik Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi.

Indikator Dampak (*Impact*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Keluarga memberikan dampak signifikan pada tiga aspek utama kehidupan peserta. Pertama, hampir seluruh informan melaporkan peningkatan kemampuan kontrol emosi setelah mengikuti program. Mereka mengakui bahwa materi yang disampaikan oleh psikolog dan dosen membantu mereka mengenali pemicu emosi negatif serta mengelola reaksi terhadap konflik rumah tangga secara lebih bijaksana. Beberapa informan bahkan menyebutkan bahwa perubahan ini berdampak pada menurunnya frekuensi pertengkaran dengan suami dan anak. Kedua, mayoritas informan merasakan peningkatan kualitas komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dengan suami dan anak menjadi lebih terarah, terbuka, dan tidak lagi bersifat satu arah. Beberapa alumni menceritakan bagaimana mereka kini lebih mendengarkan anak bercerita tentang pengalaman di sekolah, berbeda dengan kebiasaan sebelumnya yang cenderung mengabaikan atau menunda percakapan.

Ketiga, hampir seluruh informan melaporkan perubahan pola asuh anak, di mana mereka mulai meninggalkan metode pengasuhan lama yang dianggap kurang tepat dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih sabar, responsif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia dan Suryana (2021) telah memberikan kontribusi awal dengan menunjukkan bahwa program ini berdampak positif terhadap peningkatan pengasuhan orang tua. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kesenjangan yang signifikan sebagian informan mengakui bahwa dampak ekonomi belum terasa. Mereka menyatakan bahwa meskipun pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga telah meningkat, secara material tidak ada perubahan nyata pada pendapatan atau kesejahteraan ekonomi keluarga. Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Perubahan Perilaku (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991).

Teori ini menyatakan bahwa perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam program ini, peserta mengalami perubahan sikap karena mendapatkan pemahaman baru tentang pengelolaan emosi dan komunikasi keluarga melalui materi yang disampaikan oleh psikolog dan dosen. Norma subjektif terbentuk melalui interaksi dan diskusi antar peserta yang saling berbagi pengalaman. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku meningkat karena metode roleplay dan dialog memberikan simulasi langsung tentang bagaimana menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Bandura

(1971) dalam Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) menekankan bahwa perilaku baru dapat diperoleh melalui observasi dan imitasi terhadap model.

Program Sekolah Keluarga telah meningkatkan modal manusia peserta dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan sosial-emosional, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas ekonomi karena tidak adanya program tindak lanjut seperti akses permodalan atau pelatihan keterampilan vokasional. UN-Habitat (2018) dalam publikasinya *Best Practices for Family Resilience* menekankan bahwa program ketahanan keluarga yang berhasil harus menunjukkan dampak pada setidaknya tiga dari lima dimensi kesejahteraan: kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan, dan partisipasi sosial. Program Sekolah Keluarga telah menunjukkan dampak pada kesehatan mental (kontrol emosi), pendidikan (peningkatan pengetahuan pengasuhan), dan partisipasi sosial (terbentuknya komunitas belajar), namun masih lemah pada dimensi ekonomi. Untuk mencapai status *best practice* yang ideal, program ini perlu memperkuat dampak ekonominya melalui pengintegrasian modul kewirausahaan terapan dan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro.

Indikator Kemitraan (*Partnership*)

Hasil penelitian menemukan bahwa Program Sekolah Keluarga dilaksanakan melalui kolaborasi *multi-stakeholder* yang melibatkan berbagai pihak. Berdasarkan informasi dari pengelola program, secara operasional program ini dijalankan dengan dukungan berbagai mitra seperti Dinas Kesehatan, Dinas sosial, Kantor Kementerian Agama, hingga akademisi dari berbagai universitas di Sumatera Barat. Yang paling menonjol dalam indikator kemitraan adalah keterlibatan akademisi. Para peserta dan alumni secara konsisten menyebut bahwa pihak yang paling membantu dalam program ini adalah psikolog dan dosen yang menjadi narasumber. Materi yang disampaikan dinilai lebih akurat dibandingkan dengan informasi yang bersumber dari internet atau cerita dari mulut ke mulut.

Koordinator di tingkat kelurahan juga memberikan penilaian positif terhadap kualitas narasumber yang didatangkan melalui kemitraan dengan akademisi, dengan catatan bahwa para dosen menyajikan materi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh peserta yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Keberagaman latar belakang narasumber menjadi salah satu kekuatan utama program, karena peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang psikologi perkembangan anak, tetapi juga tentang kesehatan reproduksi, hukum perkawinan, ekonomi rumah tangga, pencegahan narkoba, hingga pengembangan UMKM. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kemitraan dengan sektor swasta belum

terjalin. Seluruh pendanaan dan sumber daya yang digunakan masih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi. Tidak ada keterlibatan perusahaan swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung operasional program. Untuk mencapai status best practice yang ideal, program ini perlu mengembangkan strategi kemitraan dengan sektor swasta melalui penyusunan proposal CSR yang menarik bagi perusahaan lokal, identifikasi perusahaan yang memiliki visi sejalan dengan program, penawaran skema kemitraan yang saling menguntungkan, serta pembangunan mekanisme pelaporan dan evaluasi yang transparan.

Indikator Keberlanjutan (*sustainability*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Keluarga memiliki beberapa mekanisme keberlanjutan namun masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dari aspek regulasi, program ini telah memiliki payung hukum yang kuat berupa Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi. Pengelola program menyebutkan bahwa ke depan, keberlanjutan program direncanakan untuk diperkuat melalui integrasi ke dalam regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga. Para koordinator di tingkat kelurahan juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini terlepas dari pergantian pimpinan daerah, dengan harapan program tidak hanya terikat pada periode kepemimpinan lima tahunan.

Kedua, dari aspek pendanaan, program ini menunjukkan perkembangan positif. Pada awal pelaksanaannya di tahun 2018, anggaran program adalah nol rupiah. Peserta bahkan harus membeli sendiri baju dan keperluan wisuda. Namun, pada tahun 2025 hingga 2026, program ini mulai memberikan insentif berupa uang transportasi per pertemuan serta makanan ringan. Ketiga, dari aspek antusiasme peserta, penelitian ini menemukan bahwa alumni dan peserta aktif sangat berkeinginan untuk melanjutkan program. Beberapa alumni bahkan telah mengikuti program hingga beberapa angkatan (yang mereka sebut sebagai jenjang S1 dan S2) karena menganggap program ini sangat bermanfaat, ilmunya bagus, dan bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, dari aspek modul ajar, program ini telah memiliki dokumen resmi bernama Modul Gemilang yang diluncurkan pada tahun 2025, mencakup kurikulum agama, ekonomi, dan psikologi yang menjadi panduan bagi para narasumber. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan keberlanjutan. Tantangan pertama adalah bentroknnya jadwal pelaksanaan program dengan waktu kerja peserta. Tantangan kedua adalah kesulitan mengumpulkan peserta baru karena banyak warga yang sudah pernah mengikuti program, sementara program ini tidak mengizinkan peserta yang sama untuk mengikuti kembali di

angkatan berikutnya. Tantangan ketiga adalah rendahnya partisipasi laki-laki yang berdampak pada keberlanjutan program karena ketahanan keluarga tidak dapat dibangun hanya oleh ibu-ibu saja (Sasmita, 2022).

Secara teoretis, keberlanjutan program publik dapat dianalisis menggunakan Teori Kelembagaan (Institutional Theory) yang dikembangkan oleh North dan diperluas oleh Scott (Hillman et al., n.d.). Teori ini menyatakan bahwa keberlanjutan suatu program ditentukan oleh tiga pilar kelembagaan: regulasi (*regulative pillar*), norma (*normative pillar*), dan kognisi (*cognitive-cognitive pillar*). Dalam Program Sekolah Keluarga, pilar regulasi mulai terbentuk dengan adanya SK Wali Kota dan rencana Perda Ketahanan Keluarga. Pilar norma terlihat dari semakin diterimanya program ini sebagai kebutuhan masyarakat, terbukti dari antusiasme alumni yang ingin melanjutkan ke jenjang lanjutan. Pilar kognisi (pemahaman bersama tentang pentingnya ketahanan keluarga) juga mulai terbentuk karena program ini telah berlangsung selama 8 tahun sejak 2018 dan meluluskan ribuan peserta.

Untuk mencapai status best practice, program ini perlu mengembangkan strategi keberlanjutan yang lebih komprehensif melalui diversifikasi sumber pendanaan, percepatan pengesahan Perda Ketahanan Keluarga, pengembangan model pendanaan mandiri, serta inovasi dalam rekrutmen peserta termasuk strategi khusus untuk menjangkau laki-laki..

Indikator Kepemimpinan (*leadership*)

Hasil penelitian menemukan bahwa Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi dikelola dengan model kepemimpinan distributif yang melibatkan aktor dari berbagai tingkatan, mulai dari level politik hingga level komunitas. Pertama, kepemimpinan pada level politik diinisiasi oleh Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi yang melihat tingginya angka perceraian dan meresponnya dengan mencetuskan gagasan Sekolah Keluarga. Dukungan penuh dari Wali Kota pada masa jabatan pertamanya menjadi faktor kunci yang memungkinkan program ini berjalan meskipun dengan anggaran awal nol rupiah.

Kedua, kepemimpinan pada level birokrasi dijalankan oleh DP3APPKB sebagai leading sector. Dinas ini bertanggung jawab atas koordinasi lintas sektor, penyusunan modul, penentuan kuota peserta, hingga pengadaan narasumber. Penentuan peserta sepenuhnya dilakukan oleh dinas dengan kriteria tertentu, sementara koordinator di kelurahan lebih berperan pada pelaksanaan teknis dan koordinasi di lapangan.

Ketiga, kepemimpinan pada level komunitas dijalankan oleh koordinator kelurahan yang sebagian besar adalah alumni program. Mereka berperan sebagai penghubung antara dinas dengan masyarakat, serta bertanggung jawab atas pendaftaran peserta, kehadiran, dan

motivasi. Yang menarik dari temuan ini adalah munculnya kepemimpinan alumni yang menjadi motivator bagi peserta lainnya. Beberapa alumni ditunjuk sebagai motivator yang bertugas menangani berbagai permasalahan keluarga di wilayahnya, seperti kasus KDRT, anak terlantar, dan masalah keluarga lainnya.

Model kepemimpinan di mana alumni dijadikan sebagai motivator ini menunjukkan adanya keberlanjutan kepemimpinan dari program formal ke komunitas. Alumni tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan dampak program ke masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kelemahan signifikan dalam indikator kepemimpinan, yaitu sangat rendahnya partisipasi laki-laki dalam program. Para alumni menyampaikan kritik bahwa seharusnya bapak-bapak juga diajak karena mereka pun harus tahu bagaimana mendidik anak, bukan hanya alasan mencari nafkah. Secara teoretis, kepemimpinan distributif ini dapat dijelaskan melalui Teori Distributed Leadership yang menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi kompleks tidak harus dipegang oleh satu orang, tetapi dapat didistribusikan di antara berbagai aktor yang memiliki keahlian dan otoritas berbeda (Hartomi et al., n.d.). Dalam Program Sekolah Keluarga, kepemimpinan didistribusikan secara horizontal (antar mitra: Dinas Kesehatan, Kemenag, akademisi) dan vertikal (dari level politik ke level komunitas).

Untuk mencapai status best practice, program ini perlu mengembangkan kepemimpinan yang lebih inklusif secara gender melalui perekrutan tokoh laki-laki sebagai duta program, penyelenggaraan kelas khusus laki-laki dengan jadwal fleksibel, pelibatan alumni laki-laki sebagai motivator, serta integrasi perspektif laki-laki dalam penyusunan modul dan kurikulum (UN-Habitat, 2014). Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk printscreen hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul, dan seterusnya.

Indikator Transfer ke Daerah Lain (*Replicability*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi telah menarik perhatian berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan studi banding dan mengadopsi kurikulumnya. Berdasarkan informasi dari pengelola program, program ini telah menjadi perhatian nasional karena keberhasilannya dalam meningkatkan ketahanan keluarga dengan anggaran yang relatif terbatas. Faktor-faktor yang memungkinkan program ini untuk direplikasi ke daerah lain antara lain:

pertama, ketersediaan modul ajar yang terdokumentasi dengan baik. Modul Gemilang yang disusun pada tahun 2025 mencakup kurikulum yang terstruktur meliputi tiga pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan psikologi. Modul ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Kedua, model kemitraan yang melibatkan akademisi dan praktisi. Program ini tidak bergantung pada satu jenis narasumber saja, tetapi melibatkan dosen, psikolog, penyuluh agama, dan tenaga kesehatan. Model ini dapat direplikasi karena hampir setiap daerah memiliki institusi pendidikan dan layanan publik yang serupa.

Ketiga, metode pembelajaran yang partisipatif. Program ini menggunakan metode dialog dan roleplay yang tidak memerlukan biaya mahal namun efektif dalam mengubah perilaku peserta. Proses pembelajaran berlangsung selama 15 hingga 16 kali pertemuan atau sekitar tiga bulan dengan metode dialog dan roleplay agar peserta tidak merasa bosan.

Keempat, fleksibilitas dalam penjadwalan dan pelaksanaan. Meskipun secara umum program dilaksanakan di kantor kelurahan dengan jadwal pagi, beberapa kelurahan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan warganya. Metode penyampaian materi yang mudah dipahami menjadi kunci keberhasilan yang dapat ditiru, di mana narasumber menyampaikan materi bukan dengan bahasa teori seperti di perkuliahan, melainkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu-ibu yang sudah berkeluarga dengan beraneka ragam pengalaman.

Kelima, adanya wisuda dan apresiasi bagi lulusan. Program ini memiliki ritual wisuda yang memberikan rasa bangga dan pencapaian bagi peserta, menjadi daya tarik tersendiri yang dapat direplikasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa transfer pengetahuan belum dilakukan secara sistematis. Mekanisme transfer yang ada masih bersifat pasif, di mana daerah lain datang untuk studi banding, namun belum ada program pelatihan aktif dari Kota Bukittinggi kepada daerah lain yang ingin mereplikasi program.

Para koordinator di tingkat kelurahan menekankan pentingnya pelaksanaan program di setiap kelurahan secara mandiri agar dapat direplikasi dengan baik. Secara teoretis, replikasi

program publik dapat dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) dari Rogers (2003). Rogers mengidentifikasi lima karakteristik inovasi yang memengaruhi kecepatan adopsi: keunggulan relatif (*relative advantage*) seberapa jauh inovasi dianggap lebih baik dari yang sudah ada, kompatibilitas (*compatibility*) seberapa sesuai inovasi dengan nilai dan kebutuhan pengguna, kompleksitas (*complexity*) seberapa sulit inovasi dipahami dan digunakan, triabilitas (*trialability*) seberapa mudah inovasi diuji coba dalam skala kecil, dan observabilitas (*observability*) seberapa jelas hasil inovasi dapat dilihat orang lain. Program Sekolah Keluarga memiliki keunggulan relatif yang tinggi karena terbukti berhasil mengubah perilaku keluarga dengan biaya yang relatif rendah (awalnya nol rupiah). Kompatibilitasnya juga tinggi karena materi tentang pengasuhan anak, komunikasi keluarga, dan pengelolaan emosi relevan dengan kebutuhan keluarga di hampir semua konteks budaya. Kompleksitas Untuk mencapai status best practice dalam indikator transfer, program ini perlu mengembangkan mekanisme transfer sistematis yang mencakup program train the trainer bagi calon narasumber dari daerah lain,

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan lima indikator best practice UN-Habitat (UN-Habitat, 2014), Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori praktik baik (*good practice*) yang mendekati kriteria praktik terbaik (*best practice*). Program ini dinilai berhasil dalam meningkatkan ketahanan keluarga, terbukti dengan perubahan positif pada kontrol emosi, komunikasi keluarga, dan pola asuh anak yang dirasakan langsung oleh peserta (Rahmalia & Suryana, 2021). Keberhasilan ini didukung oleh kepemimpinan distributif yang melibatkan berbagai pihak dari level politik hingga komunitas, serta kemitraan yang luas dengan berbagai dinas, institusi agama, dan akademisi (Sasmita, 2022).

Program ini juga telah menjadi perhatian nasional dengan banyaknya daerah yang melakukan studi banding, menunjukkan potensi replikasi yang tinggi. Namun demikian, terdapat tiga kelemahan utama yang perlu diperbaiki untuk mencapai status best practice secara penuh. Pertama, dampak program masih terbatas pada aspek sosial-emosional, sementara dampak ekonomi belum dirasakan secara signifikan oleh peserta (Maslow, 1943). Kedua, keberlanjutan program masih rentan karena pendanaan sepenuhnya bergantung pada APBD yang fluktuatif (Hillman et al., n.d.). Ketiga, partisipasi laki-laki masih sangat rendah, menyebabkan program didominasi oleh peserta perempuan sehingga upaya membangun ketahanan keluarga yang utuh menjadi tidak seimbang.

Saran

Bagi DP3APPKB Kota Bukittinggi, disarankan untuk mengintegrasikan modul kewirausahaan terapan dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro seperti membuka kelas khusus laki-laki dengan jadwal fleksibel (malam hari atau akhir pekan), mempercepat pengesahan Perda Ketahanan Keluarga; mendiversifikasi pendanaan melalui CSR dan dana abadi alumni, serta mengembangkan program train the trainer untuk replikasi (UN-Habitat, 2018).

Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, disarankan mengalokasikan anggaran khusus yang tidak mudah dipotong dan memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan lokal. Bagi daerah lain yang ingin mereplikasi, disarankan memulai uji coba skala kecil, melibatkan akademisi lokal, menyesuaikan modul dengan konteks.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang program, studi komparatif antar daerah yang telah mereplikasi program, serta penelitian khusus strategi peningkatan partisipasi laki-laki dalam program ketahanan keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bandura, A. (1971). *Social learning theory*. General Learning Press.
- Clarke, A., & Garside, J. (1997). The development of a best practice model for change management. *European Management Journal*, 15(5). [https://doi.org/10.1016/S0263-2373\(97\)00033-9](https://doi.org/10.1016/S0263-2373(97)00033-9)
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Development, E. C. (n.d.). *Nurturing young children through parenting support*.
- Hartomi, D., Padma, A., & Mutiarin, D. (n.d.). Analisis best practice inovasi pelayanan publik. *Jurnal*, 156–167.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Tanah Air Beta.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Rahmalia, D., & Suryana, D. (2021). Analisis kebijakan pemerintah daerah pada program sekolah keluarga. *Jurnal*, 5, 1649–1660.

- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sasmita, S. (2022). Difusi inovasi dalam program sekolah keluarga. *Jurnal*, 17, 118–129.
<https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64641>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*.
- UN-Habitat. (2014). *Submission guide and reporting format*. UN-Habitat.
- UN-Habitat. (2018). *Working for a better urban future: Annual progress report 2018*. UN-Habitat.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Era digitalisasi*.